

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perniagaan Satwa Dilindungi Undang-Undang

No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Rezyana Pinkan S¹ Rochmani²

¹Program Studi Ilmu Hukum

²Fakultas Hukum

Email : rezyana24@gmail.com¹ rochmani.unisbank@gmail.com²

ABSTRAK

Perniagaan satwa dilindungi sudah bukan lagi menjadi suatu hal yang baru, bahkan saat ini banyak satwa-satwa dilindungi yang diperjualbelikan secara bebas dan terang-terangan, penyebabnya bisa jadi karena kurang seriusnya para aparat penegak hukum memberantas perkara ini ataupun karena kurangnya pengetahuan masyarakat perihal jenis-jenis satwa. Undang-undang yang memuat perkara ini memang sudah ada sejak tahun 1990, namun pada kenyataannya masih banyak kasus serupa yang terjadi dikarenakan lemahnya sanksi pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi, sehingga tidak mudah memberikan efek jera bagi para pelaku. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa BKSDA terkesan sulit dalam membawa perkara perniagaan satwa dilindungi ke pengadilan. (2) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990. (3) Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990. Adapun tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk menjelaskan alasan BKSDA yang terkesan sulit membawa perkara perniagaan satwa dilindungi untuk diproses ke pengadilan. (2) Untuk menjelaskan apakah sanksi pidana yang didapat oleh pelaku perniagaan satwa langka dilindungi sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normative, spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, sumber data sekunder, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bukanlah wewenang BKSDA untuk membawa perkara perniagaan satwa dilindungi untuk diproses ke pengadilan. (2) Penerapan sanksi pidana dilakukan terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi dalam Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN.Bnr. melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perniagaan satwa dilindungi dalam Putusan No. 13/Pid.Sus/2020/PN.Bnr, adalah menggunakan Pertimbangan Yudiris dan Non-Yuridis. (3) Hambatan dapat terjadi dari berbagai faktor diantaranya faktor teknologi, wilayah, sarana dan prasarana, serta dukungan dari masyarakat. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa pemberantasan kasus perniagaan satwa dilindungi seharusnya menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat, masyarakat harus berperan serta membantu para penegak hukum dalam memutus penyebaran kasus perniagaan satwa dilindungi karena meskipun sudah ada undang-undang yang isinya memuat tentang larangan serta sanksi yang akan diterima oleh para pelaku, pada kenyataannya masih

banyak yang menganggap sepele perkara perniagaan satwa dilindungi.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Satwa yang Dilindungi*

ABSTRACT

The business of protected animals is no longer a new thing, even today many protected animals are traded freely and blatantly, the cause could be because of the lack of seriousness of law enforcement officials eradicate this matter or because of the lack of public knowledge about the types of animals. The law containing this case has been in place since 1990, but in reality there are still many similar cases that occur due to weak criminal sanctions against protected animal businesses, so it is not easy to provide a deterrent effect for the perpetrators. The problems examined in this study is (1) Why BKSDA seems difficult in bringing protected animal business cases to court. (2) How the enforcement of criminal law against wildlife business actors is protected in accordance with Law No. 5 of 1990. (3) What is the obstacle in the enforcement of criminal law accordance with Law No. 5 of 1990. The purpose of the study is (1) To explain why BKSDA seems difficult to bring protected animal business cases to be processed to court. (2) To explain whether the criminal sanctions obtained by the perpetrators of illegal wildlife business is in accordance with Law No. 5 of 1990. The method used in this study is normative juridical legal research method, analytical descriptive research specification, secondary data source, the data obtained is analyzed qualitatively. The results showed that (1) It is not the authority of BKSDA to bring protected animal business cases for processing in court. (2) The application of criminal sanctions shall be carried out against protected wildlife business actors in Decision No. 13/Pid.sus/2020/PN.Bnr. in violation of Article 21 paragraph (2) letter a jo. Article 4 paragraph (2) of Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, then the basis of consideration of judges in the application of criminal sanctions against protected wildlife business actors in Decision No. 13/Pi.Sus/2020/PN.Bnr, is to use Judicial and Non-Juridical Considerations. (3) Obstacles may occur from various factor including technological factors, regions, facilities and infrastructure, as well as support from the community. From this study can be concluded that the eradication of protected animal business cases should be a joint responsibility of all elements of society, the community should participate and help law enforcement in stopping the spread of protected animal business cases because although there are already laws containing prohibitions and sanctions that will be received by the perpetrators, in fact there are still many who take the case of protected animal business lightly.

Keywords: *Law Enforcement, Protected Animals*